



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT

TAHUN 2020

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja - Pangkalan Kerinci
TELP. 0761-95991 - FAX : 0761-95992



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN**

NOMOR SOP	A.39.
TANGGAL PEMBUATAN	3 AGUSTUS 2020
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL PENGESAHAN	3 AGUSTUS 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN BUDI SURLANI, S.Hut, MM Pembina TK. I NIP. 19701206 199503 1 002
NAMA SOP :	IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Standar Penerbitan Perizinan Berusaha;
7. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Nonperizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pelalawan;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu;
2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait perizinan dan nonperizinan;
3. Memiliki kemampuan pengadministrasian umum dan teknis perizinan/ nonperizinan;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet, sistem elektronik Online Single Submission (OSS) dan sistem elektronik yang terintegrasi dengan OSS;

KETERKAITAN

1. SOP Penanganan Pengaduan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer, Printer, Scanner
2. Jaringan LAN dan koneksi Internet
3. Sistem elektronik Online Single Submission (OSS)
4. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dijalankan maka yang terjadi adalah :

1. Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan perizinan
2. Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penyimpanan file perizinan dalam satu repository untuk keperluan Data Sharing (Single Filing) OSS
2. Terhubung dengan stakeholder secara aman, cepat, dan realtime (Integrated) OSS
3. Buku Register

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN**

No	Uraian Prosedur / Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Tim Teknis	Bendahara Penerimaan	Kasi. P2NP	Kabid. P3NP	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Registrasi / Pendaftaran dengan mengakses oss.go.id	MULAI									Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pendaftaran (e-mail aktif, NIK, Akta, NPWP Valid-KSWP)	15 menit	Username Akun OSS	
2	Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan Berdasarkan Komitmen										Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pendukung.	120 menit	NIB, Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan Belum Berlaku Efektif (berkomitmen)	
3	Pemenuhan Komitmen (Pelaku usaha menyerahkan berkas pemenuhan komitmen, diterima dan diverifikasi oleh petugas front office untuk selanjutnya di diproses oleh petugas Back Office)										Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait NSPK K/L terkait	1 hari kerja	Tanda Terima Berkas	
4	Evaluasi teknis dan peninjauan lapangan (apabila diperlukan)										Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait NSPK K/L terkait, surat tugas	5 hari kerja	Berita Acara dan Rekomendasi Teknis	
5	Pembayaran Retribusi/PNBP										Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait NSPK K/L terkait, dokumen retribusi/PNBP	15 menit	SKRD/SSRD/PNBP	
6	Verifikasi dan Validasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan										Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait NSPK K/L terkait, rekomendasi teknis	1 hari kerja	Hasil Verifikasi dan Validasi	
7	Notifikasi Persetujuan/Penolakan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan										Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait NSPK K/L terkait, rekomendasi teknis, hasil verifikasi	15 menit	Surat Persetujuan / Penolakan	
8	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan Berlaku Efektif (telah memenuhi komitmen)	SELESAI									Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait NSPK K/L terkait	15 menit	Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan Berlaku Efektif	